

ABSTRAK

Tesis dengan judul Kebijakan Penyidikan Tindak Pidana Pengusahaan Air Bawah Tanah di Ditreskrimsus Polda Jateng. Kepolisian memiliki wewenang untuk melakukan penyidikan, hal ini sesuai dengan Perkap Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana, dimana penyidikan dilakukan atas dasar : 1) laporan polisi/pengaduan, 2) surat perintah tugas, 3) laporan hasil penyelidikan, 4) surat perintah penyidikan. Berdasarkan uraian dalam Tesis ini, permasalahan yang akan yang akan di teliti adalah: 1. Bagaimana kebijakan penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pengusahaan air bawah tanah saat ini ? 2. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penyidikan tindak pidana pengusahaan air bawah tanah yang akan datang ?

Tujuan penelitian dalam penelitian ini : 1. Untuk mengetahui kebijakan penyidik dalam melakukan penyidikan tindak pidana pengusahaan air bawah tanah saat ini. 2. Untuk mengetahui kebijakan hukum pidana dalam penyidikan tindak pidana pengusahaan air bawah tanah yang akan datang.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : Seluruh rangkaian perbuatan Hotel New Puri Garden (PT. AGUNG ASRI JAYA) Jl. Arteri Utara Blok D 4 Puri Anjasmoro Semarang yang melakukan pengusahaan sumber daya air dari air tanah dalam bentuk pengambilan air tanah yang tidak dilengkapi dengan izin yang diterbitkan oleh pemerintah menyalahi : a. Pasal 11 ayat (2) Undang-Undang RI No. 11 Tahun 1974 tentang Pengairan : b. Pasal 15 ayat (1) huruf b Undang-undang RI No.11 Tahun 1974 tentang Pengairan c. Pasal 34 ayat 1 huruf b Peraturan Pemerintah No. 121 Tahun 2015 tentang Pengusahaan Sumber Daya Air. Sehubungan dengan pemberian izin pengambilan air tanah diharapkan Gubernur Jawa Tengah dan DITRESKRIMSUS POLDA JATENG sebagai pelaksana di lapangan bisa berkoordinasi dengan baik dan memperhitungkan dampak pengusahaan air bawah tanah dalam jangka panjang.

Kata Kunci : Kebijakan Hukum Pidana, Tindak Pidana Pengusahaan Air Bawah Tanah.

ABSTRACT

Thesis under the title of Policy Investigation Criminal Sub-sector of Sub-Water Enterprise at Ditreskrimsus Polda Jateng. The police have the authority to conduct an investigation, in accordance with Perkap No. 14 of 2012 on Crime Investigation Management, where investigations are conducted on the basis of: 1) police report/complaint, 2) warrant duty, 3) investigation report, 4) letter order investigation. Based on the description in this Thesis, the issues that will be studied are: 1. How is the investigator's policy in conducting an investigation of the current underground water concession? 2. What is the policy of criminal law in the investigation of future underground water concessions?

The purpose of research in this study: 1. To know the investigator's policy in conducting an investigation of criminal acts of underground water concession today. 2. To know the criminal law policy in the investigation of future underground water utility.

The result of the research concludes that: All series actions of Hotel New Puri Garden (PT AGUNG ASRI JAYA) Jl. North Artery Block D 4 Puri Anjasmoro Semarang which conducts the operation of water resources from groundwater in the form of groundwater extraction which is not equipped with permits issued by the government violates: a. Article 11 paragraph (2) RI Law no. 11 Year 1974 on Watering; b. Article 15 paragraph (1) Sub-Paragraph b of the Law of the Republic of Indonesia No.11 Year 1974 on Irrigation c. Article 34 paragraph 1 letter b of Government Regulation no. 121 of 2015 on the Management of Water Resources. In relation to the granting of groundwater permit, it is expected that the Governor of Central Java and DITRESKRIMSUS POLDA JATENG as the executor in the field can coordinate well and take into account the impact of underground water exploitation in the long term.

Keywords: Criminal Law Policy, Crime of Underground Water Utilization.